

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA KUPANG

Cecilia Wirna F Rowa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

e-mail : ceciliawirna@yahoo.com

I Komang Arthana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

e-mail : komang.arthana@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik terhadap pencegahan kecurangan di BPR di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan pada lima Bank Perkreditan Rakyat dari total tujuh Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang. Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami pertumbuhan bisnis dengan kinerja keuangan yang relatif stabil. Metode pengujian yang digunakan adalah statistik deskriptif, statistik inferensial yang terdiri dari penilaian model pengukuran / model luar dan penilaian model struktural / model dalam dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada BPR di Kota Kupang.

Kata kunci: Tata kelola perusahaan yang baik, Pencegahan kecurangan, BPR.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the principles of good corporate governance on fraud prevention in Rural Banks in Kupang City, East Nusa Tenggara Province. This research was conducted on five Rural Credit Banks out of a total of seven Rural Credit Banks in Kupang City. Rural Banks in East Nusa Tenggara Province experienced business growth with relatively stable financial performance. The testing methods used are descriptive statistics, inferential statistics consisting of assessment of the measurement model / outer model and assessment of the structural model / inner model and hypothesis testing. The results of this study show that the principles of good corporate governance have a positive and significant effect on the prevention of fraud in Rural Banks in the City of Kupang.

Keywords : *Good corporate governance, Fraud prevention, Rural banks.*

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi bank tidak perlu diragukan lagi yakni, sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Bank dapat menyediakan jasa lainnya yakni pembayaran tagihan, transfer dana dan masih banyak lagi.

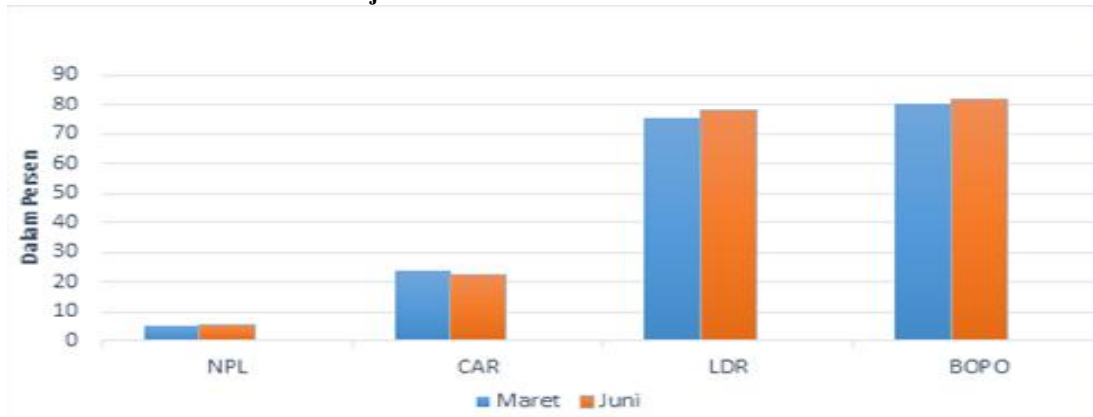
Bank tidak lepas dari fungsi intermediasi. Terutama Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang merupakan bank konvensional yang dekat dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. BPR sendiri tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menerima simpanan dalam bentuk giro, kegiatan valas dan perasuransian.

Terkait dengan gambar 1 disajikan Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II 2018 dari bulan Maret hingga Juni,

menyatakan rasio *Non Performing Loan* BPR di Indonesia 5,10% menjadi 5,41% dan *Loan to Deposit Ratio* 75,43% pada bulan Maret meningkat hingga 77,60%. *Capital Adequacy Ratio* mengalami penurunan dari 24,10%

menjadi 22,72%. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dari 80,59% pada bulan Maret menjadi 81,74% pada bulan Juni.

Gambar 1
Kinerja BPR Bulan Maret- Juni 2018



Sumber: LPIP Triwulan II 2018 (data diolah 2019)

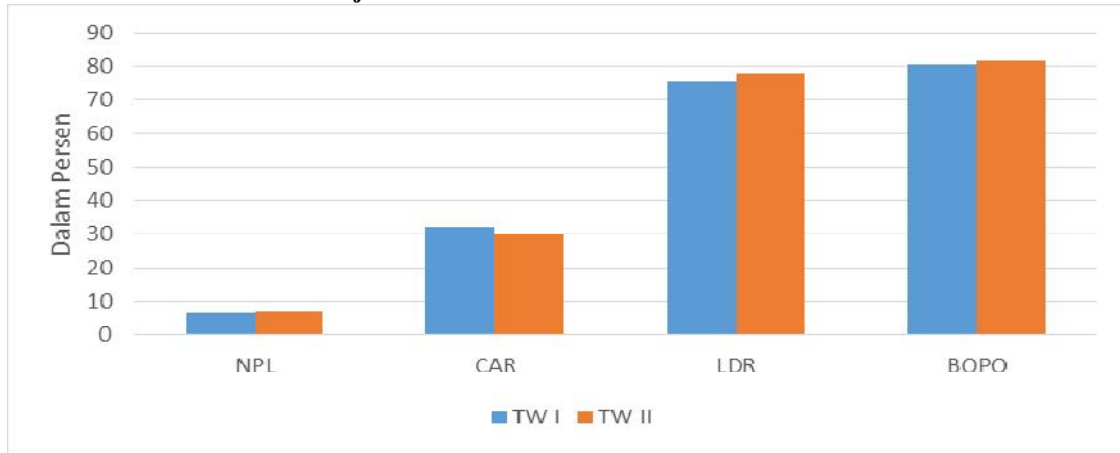
Pada gambar 1, tampak kinerja keuangan BPR di Indonesia yang cukup baik. Walaupun, rasio NPL mengalami peningkatan nilai menjadi 5,41%, CAR mengalami penurunan namun masih dalam kategori sehat. LDR pada bulan Juni meningkat 77,60% dalam batas aman. Sedangkan, BOPO mengalami kenaikan 81,74% dalam kisaran efisien.

Perkembangan Kinerja Keuangan BPR Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada gambar 2 berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Nusa Tenggara Timur. Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat,

secara umum relatif stabil dengan sedikit penurunan. Resiko kredit bermasalah meningkat ke angka 7,2 % pada triwulan II, lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yaitu 6,8%.

Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR mengalami penurunan ke 29,75% dari sebelumnya 32,21%. *Loan to Deposit Ratio* mengalami peningkatan menjadi 77,92% dari sebelumnya 75,9%. Beban operasional BPR juga sedikit meningkat mengakibatkan adanya tambahan tekanan pada BOPO ke angka 81,82% dari sebelumnya 80,59%.

Gambar 2
Kinerja BPR NTT Triwulan I & 2 2018



Sumber: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regiona NTT 2018

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan rasio NPL mengalami kenaikan 7,2% menyatakan BPR NTT masih menghadapi resiko kredit bermasalah. CAR mengalami penurunan menjadi 29,75% pada triwulan II namun masih dalam kategori sehat. LDR meningkat 77,92% dalam batas aman. BOPO pada triwulan II mengalami kenaikan 81,82% dalam kisaran efisien

Penilaian kinerja keuangan suatu Bank Perkreditan Rakyat cukup penting, tata kelola Bank Perkreditan Rakyat yang baik (*good corporate governance*) juga menjadi isu penting yang harus digaris bawahi oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat saat ini. Laporan Profil Industri Perbankan menyatakan, terdapat empat BPR di Indonesia yang dicabut izin usahanya pada triwulan II-2018. Bank Perkreditan Rakyat yang dicabut izin usahanya yakni : PT BPR Bina Dian Citra, PT BPR Akarumi, PR BPR Budi Setia, dan PT BPR Mega Karsa Mandiri. Terkait dengan BPR yang beroperasi, terdapat 12 BPR yang menjalankan usahanya di Nusa Tenggara Timur ditampilkan dalam tabel 1.

Tabel 1
Data BPR di NTT

PT BPR Central Pitoby	Kota Kupang
PT BPR Sari Dinar Kencana	Kota Kupang
PT BPR Tanaoba Lais Manekat	Kota Kupang
PT BPR Timor Raya Makmur	Kota Kupang

PT BPR Christa Jaya Perdana	Kota Kupang
PT BPR Nusantara Abdi Mulia	Kota Kupang
PT BPR Modern	Kota Kupang
PT BPR Dana Mas	Kabupaten Belu
PT BPR Tanjung Pratama	Kabupaten Belu
PT BPR Lugas Ganda	Kabupaten Manggarai
PT. BPR Bina Usaha dana	Kabupaten Flores Timur
PT BPR Talenta Raya	Kabupaten Sumba Timur

Sumber : OJK,2018

Berdasarkan tabel 1 terdapat 12 BPR yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan 7 diantaranya beroperasi di wilayah Kota Kupang. Pertumbuhan bisnis BPR di NTT terus meningkat dengan 9 BPR dalam kategori sehat, sedangkan tiga lainnya dibawah kategori sehat namun bukan berarti tidak sehat. Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kupang Winter Marbun dilansir dari Pos Kupang (Selasa 03 Juli 2018).

Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini ditegaskan kembali dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia tahun 2016 di Pontianak. BPR menghadapi 5 masalah yakni : (1) *Lack of Capital*, (2) *Lack of Management*, (3) *Lack*

of *Governance*, (4) *Lack of IT System*, dan (5) *Government Policy* (OJK).

Lack of governance menjadi salah satu indikator terjadinya *fraud* yang menyebabkan dari dicabutnya izin usaha BPR tersebut. Direktur Groups Pengelolaan Operasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menjelaskan, sebagian besar kasus penutupan BPR disebabkan oleh *fraud*, persentasenya mencapai 99 %. Pencabutan izin usaha BPR yang merupakan upaya dari Lembaga Penjamin Simpanan untuk menciptakan industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.

Tata kelola yang baik merupakan salah satu cara untuk mencegah permasalahan yang muncul pada BPR mengingat BPR cenderung berisiko terkena masalah karena jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan bank umum. Berdasarkan dari fakta ini, peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang”.

KAJIAN TEORI

Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Bank Perkreditan Rakyat menjalankan suatu kegiatan usaha yaitu sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Bertugas memberikan kredit.
- 3) Bertugas untuk menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 4) Bertugas untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Forum *for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Good Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan interen dan eksteren lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Sari dkk, 2015).

Menurut Tangkilisan (2003) *good corporate governance* (GCG) adalah sebuah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan serta mengalokasikannya ke berbagai pihak yang berkepentingan seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

2. Prinsip *Good Corporate Governance*

- 1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- 5) Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

3. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;
- 2) Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi komite;
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- 6) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- 7) Batas maksimum pemberian kredit;
- 8) Rencana strategis BPR; dan
- 9) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Teori – Teori Pemahaman *Good Corporate Governance*

1. Teori Keagenan

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Untuk membuat *good corporate governance* berfungsi dengan baik, terdapat kelompok-kelompok yang harus saling berinteraksi yaitu tersedianya undang-undang atau jaminan hukum yang kuat, ditegakkannya *accountability*, adanya fungsi direksi dan manajer yang membantu direksi (Sutedi, 2010).

2. Teori *Stewardship*

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Daniri 2005).

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdapat dalam perusahaan akan memaksimalkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Wijaya dan Sudarma (2015) menyatakan bahwa *steward* sebagai pihak yang diberi kepercayaan sedangkan prinsipal sebagai pihak yang memberi kepercayaan. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para pihak manajemen pada perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik kepada prinsipalnya

Kecurangan (*Fraud*)

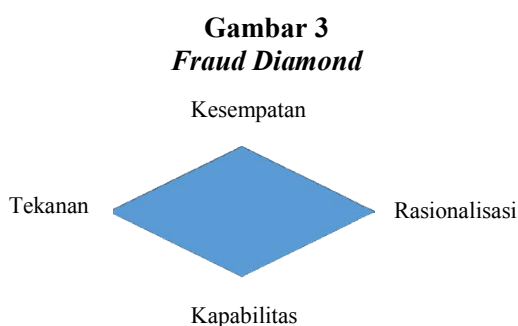
1. Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*Fraud*) merupakan perbuatan yang disengaja dengan maksud menipu dan mengambil keuntungan dari pihak lain. Secara harafiah, IIA (2009) dalam Modul Audit Forensik Universitas Trisakti (2015) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai: “Setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan adanya tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau ancaman fisik. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik.

2. *Fraud Diamond*

Fraud diamond merupakan pandangan baru tentang *fraud* yang dikemukakan oleh

Wolfe dan Hermanson (2004), teori tersebut merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari *triangle fraud theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1950) dimana *fraud diamond* menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yakni *capability*, bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan perlu mempertimbangkan elemen keempat. Selain menangani *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* juga harus mempertimbangkan *individual's capability* (kemampuan individu) yaitu sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam kecurangan yang mungkin benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran tiga unsur lainnya. Secara keseluruhan elemen-elemen dari *fraud diamond theory* disajikan pada gambar 3.



Sumber : Wolfe dan Hermanson (2004)

Berdasarkan gambar 3 elemen-elemen dalam *fraud diamond* terbagi atas tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. Elemen-elemen tersebut disajikan secara terperinci yakni :

1) Tekanan (*Pressure*)

Keinginan karyawan untuk bertindak *fraud* karena adanya tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Biasanya dorongan/ tekanan situasional tersebut timbul karena adanya masalah keuangan, tetapi bisa juga terjadi karena gejala-gejala tekanan lainnya seperti tekanan pekerjaan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Wexley dan Yuki (2003) menyebutkan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan

juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja.

Kebutuhan akan berupa materi seperti uang merupakan tekanan yang paling banyak menyebabkan kecurangan. Cara mengatasi tekanan berupa material misalnya dengan memberikan kesesuaian kompensasi sesuai tugas pokok dan fungsinya, kesesuaian kompensasi berimplikasi mengurangi kecurangan. Hasil penelitian Thoyibatun (2009) menemukan sistem kompensasi yang sesuai dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

2) Kesempatan (*Opportunity*)

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Pengendalian internal yang baik dan efektif akan menutup peluang terjadinya kecurangan. Hasil penelitian Wilopo (2006) dan Najahningrum (2013) menemukan keefektifan pengendalian internal dalam suatu organisasi/instansi dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Penyalahgunaan wewenang ini bersebrangan dengan prinsip teori keagenan. Pihak agen sudah memberikan wewenang atau otorisasinya kepada manajemen untuk mengelola organisasi perusahaan dengan baik.

3) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Hampir semua *fraud* dilatarbelakangi oleh rasionalisasi. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan *fraud* pada akhirnya melakukannya.

Teori agensi menjelaskan bahwa agen meng-otorisasikan perusahaan kepada manajemen untuk memenuhi keinginan pihak agen. Namun terkadang manajemen juga memiliki rasionalisasi lain untuk memenuhi kepentingan manajemen sendiri. Albrecht et al. (2011) mengemukakan bahwa

pikiran rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan *fraud* antara lain:

4) Kapabilitas (*Capability*)

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa banyak *fraud* yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. *Opportunity* membuka peluang atau pintu masuk bagi *fraud*, sedangkan *pressure* dan *rationalization* yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

3. Pencegahan *Fraud*

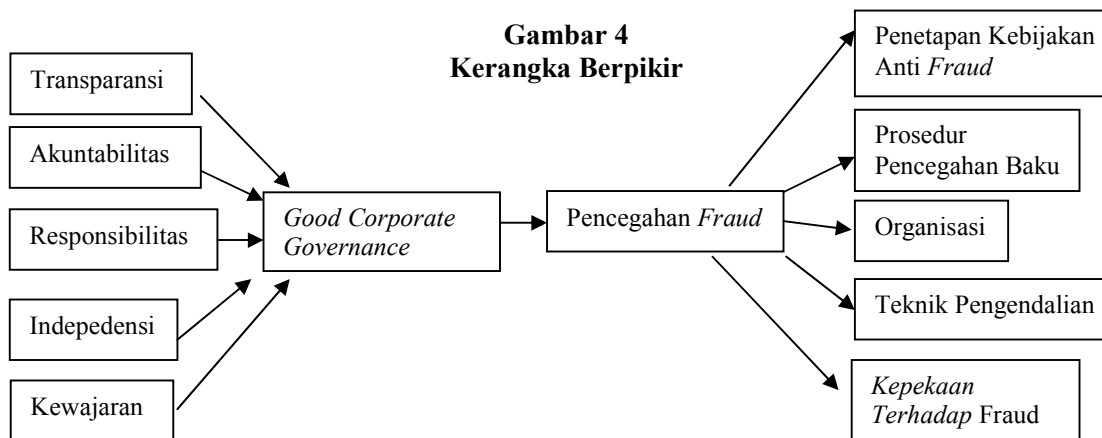
Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (pusdiklatwas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2008, pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*. Pusklatwas BPKP (2008) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

- 1) Penetapan Kebijakan Anti *Fraud*
- 2) Prosedur Pencegahan Bahan Baku

- 3) Organisasi
- 4) Teknik Pengendalian
- 5) Kepekaan terhadap *Fraud*

Kerangka Berpikir

Pencegahan *fraud* pada PT BPR *Central Pitoby*, PT BPR *Tanaoba Lais Manekat*, PT BPR *Timor Raya Makmur*, PT BPR *Christa Jaya Perdana*, dan PT BPR *Nusantara Abdi Mulia*, dapat diketahui dari penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada BPR-BPR tersebut. Penelitian ini menggunakan variable eksogen yakni *good corporate governance* dan dimensi variabel eksogen yakni: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel endogen dalam penelitian ini yakni pencegahan *fraud* dengan dimensi penetapan kebijakan anti *fraud*, prosedur pencegahan baku, organisasi, teknik pengendalian, dan kepekaan terhadap *fraud*.



Sumber: Data diolah, 2019

Menurut Dominikus (2014), penerapan *corporate governance* tidak hanya tergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan tergantung pada integritas dan likuiditas sumber daya manusia yang ada. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *corporate governance*. Hasil Mahendrayasa dan Putri (2017), transparansi dan responsibilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Variabel x (eksogen) terhadap pencegahan fraud.

Hasil Penelitian Jannah (2016) mengungkapkan, variabel *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel x (eksogen) terhadap pencegahan fraud.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat yang berada di Nusa Tenggara Timur, dengan mengakses laman www.ojk.go.id untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang BPR di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemilihan sampel penelitian pada 5 BPR dilakukan secara *purposive sampling* dimana dari 12 BPR yang beroperasi di wilayah NTT dipilih 5 BPR. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut :

- 1) Perusahaan BPR NTT yang terdaftar di OJK.
- 2) Perusahaan BPR NTT yang mengalami kasus penipuan oleh nasabah.

Penyebaran kuesioner dilakukan pada *top level management* dan *middle level management* pada masing-masing BPR disesuaikan dengan struktur organisasi dan keadaan masing-masing BPR.

Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif, yaitu analisis empiris secara deskripsi tentang informasi yang diperoleh untuk memberikan gambaran/menguraikan tentang suatu kejadian (siapa/apa, kapan, dimana, bagaimana, berapa banyak) yang dikumpulkan dalam penelitian (Supranto:2002). Data tersebut berasal dari jawaban yang diberikan oleh responden atas item-item yang terdapat dalam kuesioner. Selanjutnya peneliti akan mengolah data-data yang ada dengan cara dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan.

Statistik inferensial, (statistik induktif atau statistik probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2018). Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan software *SmartPLS (Partial Least Square)* versi 2.0.m3 mulai dari pengukuran model (*outer model*), struktur model (*inner model*) dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang kemudian diuji. Penelitian dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 36 responden yang menempati posisi *top level management* dan *middle level management* pada lima Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang. Dari 36 responden yang direncanakan semuanya (100%) responden mengembalikan dan mengisi kuesioner. Semua responden sebanyak 33 atau setara 92% responden yang lengkap mengisi kuesioner dan layak dijadikan data, sedangkan 3 responden atau setara 8% tidak lengkap mengisi kuesioner sehingga tidak layak dijadikan data untuk diproses lebih lanjut.

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistika deskriptif diperlukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai jawaban responden melalui kuesioner yang disebar di lima Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang dengan posisi yang ditempati oleh responden berada pada *top level management* dan *middle level management*. Analisis statistik

deskriptif untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Good Corporate Governance	33	62	80	70.64	6.837
Pencegahan Fraud	33	58	75	66.58	6.685

Sumber: data diolah, 2019

Pada tabel 2 *good corporate governance* memiliki nilai minimum 62 dan maksimum 80. Standar Deviasi *good corporate governance* yakni 6,8 lebih kecil dari nilai *mean* yang artinya nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Pencegahan *fraud* memiliki nilai minimum 58 dan nilai maksimum 75 dengan standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean* yang artinya nilai *mean* pencegahan *fraud* digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

2. Asesmen Model Pengukuran (Outer Model)

1) Convergent Validity

Convergent validity di dalam PLS dengan indikator reflektif dilihat berdasarkan nilai *loading factor* (korelasi antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk) (Jogiyanto dan Willy, 2009). *Convergent Validity* dapat dievaluasi dengan 3 tahap, yakni: faktor *loading*, *Average Varian Extracted (AVE)* dan *Communality*. *Discriminant Validity* dilalui dengan tahap akar *AVE* dan korelasi variabel laten atau nilai *cross loading*.

Factor Loading

Berdasarkan sajian data dalam tabel 3, diketahui masing-masing indikator variabel penelitian mayoritas yang memiliki nilai *outer loading* > 0,7. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang memiliki *outer loading* < 0,7. *Rule of thumb* yang digunakan untuk *outer loading* yakni > 0,7 (Chin 1995).

Tabel 3 menunjukkan Indikator X_{11} dan X_{12} nilai *outer loadingnya* < 0,7 sehingga indikator tersebut harus dihilangkan. Penghilangan Indikator X_{11} dan X_{12} menyebabkan perubahan nilai *factor loading* X_{13} dan X_{14} menjadi 0,94 dan 0,92. Sementara itu, nilai *factor loading* indikator lain tetap sama.

Tabel 3
Loading Factor

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Good Corporate Governance	Transparansi	X_{11}	0.27	Tidak Valid
		X_{12}	0.10	Tidak Valid
		X_{13}	0.91	Valid
		X_{14}	0.92	Valid
	Akuntabilitas	X_{21}	0.87	Valid
		X_{22}	0.82	Valid
		X_{23}	0.91	Valid
	Responsibilitas	X_{31}	0.89	Valid
		X_{32}	0.84	Valid
	Independensi	X_{41}	0.87	Valid
		X_{42}	0.91	Valid
		X_{43}	0.88	Valid
		X_{44}	0.93	Valid
	Kewajaran	X_{51}	0.76	Valid
X_{52}		0.88	Valid	
X_{53}		0.79	Valid	
Pencegahan Fraud	Penetapan Kebijakan Anti Fraud	Y_{11}	0.93	Valid
		Y_{12}	0.95	Valid
		Y_{13}	0.95	Valid
	Prosedur Pencegahan Baku	Y_{21}	0.81	Valid
		Y_{22}	0.87	Valid
		Y_{23}	0.81	Valid

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
	Organisasi	Y ₃₁	0.84	Valid
		Y ₃₂	0.84	Valid
		Y ₃₃	0.86	Valid
		Y ₃₄	0.86	Valid
	Teknik Pengendalian	Y ₄₁	0.83	Valid
		Y ₄₂	0.79	Valid
		Y ₄₃	0.90	Valid
	Kepekaan Terhadap Fraud	Y ₅₁	0.93	Valid
		Y ₅₂	0.87	Valid

Sumber : Data diolah, 2019

AVE dan Communalitiy

Tabel 4
AVE dan Communalitiy

	AVE	Communalitiy
X	0.66	0.66
Y	0.62	0.62
TP	0.71	0.71
KTF	0.81	0.81
TR	0.87	0.87
AB	0.76	0.76
RB	0.75	0.75
IS	0.81	0.81
KW	0.67	0.67
PKAF	0.89	0.89
PPB	0.69	0.69

Sumber : Data diolah, 2019

Keterangan :

- X :Good Corporate Governance
- Y :Pencegahan Fraud
- TP :Teknik Pengendalian
- KTF :Kepekaan Terhadap Fraud
- TR :Transparansi
- AB :Akuntabilitas
- RB :Responsibilitas
- IS :Indepedensi
- KW :Kewajaran
- PKAF :Penetapan Kebijakan Anti Fraud
- PPB :Prosedur Pencegahan Baku
- OR :Organisasi

Output AVE seperti yang terlihat pada tabel 4.3, semuanya menunjukkan nilai di atas 0,50. Variabel *good corporate governance* (X) dengan nilai *output AVE* sebesar 0,66 . Sub Variabel *good corporate governance* yakni transparansi (tr) dengan nilai *output* 0,87, akuntabilitas (ab) dengan nilai *output* 0,76, responsibilitas (rb) dengan nilai *output* 0,75,

indepedensi dengan nilai *ouput* 0,81 (rb), kewajaran (kw) dengan nilai *ouput* 0,67.

Variabel pencegahan *fraud* (Y) dengan nilai *AVE* sebesar 0,62. Sementara itu sub variabel pencegahan *fraud* yang terdiri dari penetapan kebijakan anti *fraud* (pkaf) dengan nilai *AVE* 0,89, prosedur pencegahan baku (ppb) dengan nilai *AVE* 0,69, organisasi dengan nilai *AVE* 0,73, teknik pengendalian (tp) dengan nilai 0,71 dan kepekaan terhadap *fraud* 0,81.

Communalitiy adalah ukuran kualitas model pengukuran pada tiap blok variabel laten yang dihasilkan dalam proses iterasi algoritma dalam PLS. Hasil *output communalitiy* memperlihatkan Variabel *good corporate governance* (X) dan sub variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepdedensi dan kewajaran lebih dari 0,5. Sementara itu, variabel pencegahan *fraud* (Y) dengan nilai *communalitiy* 0,62.

Sub variabel pencegahan *fraud* yaitu, penetapan kebijakan anti *fraud*, prosedur pencegahan baku, organisasi, teknik pengendalian dan kepekaan terhadap nilainya berada diatas 0,5 (Chin 1995). Dengan demikian dapat dikatakan *Convergent Validity* yang baik.

Discriminant Validity

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi degan tinggi. Evaluasi *discriminant validity* dilakukan dapat dilakukan dalam dalam dua tahap, yaitu melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel > 0.70 (Chin 1995) atau dengan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai *AVE* atau korelasi antara konstruk dengan akar *AVE*.

Tabel 5
Cross Loading
Dimensi Good Corporate Governance

	Tr	Ab	Rb	Is	Kw
X13	0.94	0.82	0.69	0.80	0.77
X14	0.92	0.68	0.67	0.66	0.57
X21	0.71	0.87	0.81	0.80	0.74
X22	0.67	0.82	0.58	0.66	0.61
X23	0.73	0.91	0.75	0.84	0.90
X31	0.70	0.81	0.90	0.79	0.69
X32	0.56	0.61	0.83	0.59	0.60
X41	0.70	0.74	0.74	0.87	0.65
X42	0.68	0.84	0.66	0.91	0.81
X43	0.67	0.80	0.79	0.88	0.76
X44	0.79	0.80	0.72	0.93	0.87
X51	0.51	0.71	0.65	0.68	0.76
X52	0.72	0.78	0.75	0.81	0.88
X53	0.51	0.62	0.39	0.60	0.79
Y11	0.50	0.76	0.59	0.68	0.72
Y12	0.56	0.79	0.66	0.81	0.90
Y13	0.50	0.81	0.68	0.82	0.78
Y21	0.61	0.63	0.68	0.72	0.65
Y22	0.32	0.49	0.53	0.68	0.60
Y23	0.44	0.60	0.52	0.65	0.65
Y31	0.59	0.75	0.64	0.70	0.77
Y32	0.50	0.54	0.52	0.67	0.67
Y33	0.72	0.76	0.63	0.74	0.86
Y34	0.39	0.50	0.41	0.56	0.86
Y41	0.66	0.72	0.52	0.59	0.59
Y42	0.56	0.64	0.59	0.63	0.61
Y43	0.63	0.72	0.53	0.72	0.73
Y51	0.66	0.65	0.63	0.76	0.79
Y52	0.47	0.54	0.47	0.58	0.52

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 6
Cross Loading
Dimensi Pencegahan Fraud

	Pkaf	Ppb	Or	Tp	Ktf
X13	0.61	0.53	0.67	0.78	0.69
X14	0.41	0.51	0.53	0.56	0.49
X21	0.72	0.69	0.63	0.64	0.55
X22	0.64	0.52	0.61	0.72	0.62
X23	0.81	0.60	0.72	0.78	0.59
X31	0.71	0.70	0.57	0.63	0.59
X32	0.44	0.49	0.56	0.47	0.48
X41	0.71	0.74	0.62	0.60	0.63
X42	0.74	0.67	0.71	0.70	0.56
X43	0.73	0.73	0.66	0.70	0.72
X44	0.76	0.81	0.82	0.76	0.79
X51	0.77	0.74	0.66	0.67	0.53
X52	0.67	0.66	0.75	0.77	0.70

X53	0.65	0.46	0.59	0.66	0.54
Y11	0.93	0.70	0.74	0.68	0.61
Y12	0.95	0.76	0.84	0.79	0.74
Y13	0.95	0.79	0.71	0.69	0.59
Y21	0.65	0.81	0.64	0.69	0.72
Y22	0.62	0.87	0.66	0.45	0.52
Y23	0.70	0.81	0.73	0.52	0.48
Y31	0.79	0.68	0.84	0.79	0.68
Y32	0.67	0.79	0.84	0.51	0.54
Y33	0.64	0.59	0.86	0.79	0.71
Y34	0.67	0.71	0.86	0.51	0.59
Y41	0.51	0.51	0.59	0.83	0.64
Y42	0.68	0.58	0.61	0.79	0.55
Y43	0.72	0.61	0.73	0.90	0.82
Y51	0.70	0.71	0.79	0.79	0.93
Y52	0.52	0.52	0.52	0.63	0.87

Sumber : Data diolah, 2019

Keterangan :

- TR :Transparansi
- AB :Akuntabilitas
- RB :Responsibilitas
- IS :Indepedensi
- KW :Kewajaran
- PKAF :Penetapan Kebijakan Anti Fraud
- PPB :Prosedur Pencegahan Baku
- OR :Organisasi
- TP :Teknik Pengendalian
- KTF :Kepekaan Terhadap Fraud

Hasil *output SmartPls*, memperlihatkan setiap indikator yang mengukur konstraknya berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Seperti yang terlihat pada tabel 5 indikator X₁₃ dan X₁₄ memiliki korelasi lebih tinggi terhadap konstruk asosiasinya yakni transparansi (tr) yakni, 0,94 dan 0,92. Indikator X₂₁, X₂₂, X₂₃ dengan nilai korelasi 0,87, 0,82 dan 0,91 terhadap akuntabilitas (ab) Indikator X₃₁ dan X₃₂ masing-masing dengan nilai korelasi 0,90 dan 0,83 terhadap konstruk asosiasinya yakni responsibilitas (rb). Indikator X₄₁, X₄₂, X₄₃, X₄₄ dengan koefisien korelasi sebesar 0,87, 0,91, 0,88 dan 0,93 terhadap indepedensi (is). Indikator X₅₁, X₅₂, X₅₃ dengan nilai korelasi 0,76, 0,88 dan 0,79 terhadap kewajaran (kw). Sama halnya dengan indikator konstruk lainnya yang berkorelasi lebih tinggi dengan konstruk asosiasinya dibandingkan dengan konstruk lain, sehingga dapat dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran (Hartono, 2008 dalam Jogiyanto dan Willy, 2009). Uji reliabilitas dalam PLS menggunakan dua metode, yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Rule of thumb* nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* diatas 0,7 . Hasil uji *cronbach alpha* dan *composite reliability* dapa dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Cronbach's Alpha Dan Composite Reliability

	<i>Cronbachs Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
X	0.95	0.96
TR	0.85	0.93
AB	0.84	0.90
RB	0.68	0.86
IS	0.92	0.94
KW	0.75	0.85
Y	0.95	0.96
PKAF	0.94	0.96
PPB	0.78	0.87
OR	0.87	0.91
TP	0.80	0.88
KTF	0.78	0.89

Sumber : Data diolah, 2019

Keterangan :

- X: Good Corporate Governance
- TR: Transparansi
- AB: Akuntabilitas
- RB: Responsibilitas
- IS: Independensi
- KW: Kewajaran
- Y: Pencegahan Fraud
- PKAF: Penetapan Kebijakan Anti Fraud
- PPB: Prosedur Pencegahan Baku
- OR: Organisasi
- TP: Teknik Pengendalian
- KTF: Kepekaan Terhadap Fraud

Berdasarkan tabel 7 hasil *output* pengujian *cronbach's alpha* dan *composite reliability* > 0,7 (Chin 1995) bisa dikatakan reliabel sehingga semua instrumen (kuesioner) pada penelitian ini dinyatakan “reliabel” dan

teruji kehandalannya sehingga dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

3. Asesmen Model Struktural (Inner Model)

Asesmen model struktural dilakukan dengan melihat relasi/koeffisien jalur antar peubah laten yang satu dengan peubah laten yang lain sesuai dengan hipotesis yan diajukan. *Goodness of fit inner model* diukur menggunakan *R-square*. Tingkat signifikasi pengaruh dapat dilihat dengan *path coefficients* dan nilai signifikasi t-statistik.

1) *R-Square*

Tabel 8
R-Square

	<i>R Square</i>	Y	0.805
X	0.999	PKAF	0.842
TR		PPB	0.787
AB		OR	0.875
RB		TP	0.786
IS		KTF	0.727
KW		PPB	0.787

Sumber : Data diolah, 2019

Keterangan :

- X: Good Corporate Governance
- TR: Transparansi
- AB: Akuntabilitas
- RB: Responsibilitas
- IS: Independensi
- KW: Kewajaran
- Y: Pencegahan Fraud
- PKAF: Penetapan Kebijakan Anti Fraud
- PPB: Prosedur Pencegahan Baku
- OR: Organisasi
- TP: Teknik Pengendalian
- KTF: Kepekaan Terhadap Fraud

Berdasarkan tabel 8 nilai *R-Square* untuk variabel *good corporate governance* (X) memberikan nilai sebesar 0.999. Hal ini berarti *good corporate governance* dapat dijelaskan dengan baik oleh prinsip transparansi (tr), akuntabilitas (ab), responsibilitas (rb), independensi (is) dan kewajaran (kw). Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dapat mempengaruhi pencegahan terhadap *fraud*

sebesar 80,5% sementara 19,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Pengaruh prinsip transparansi (tr), akuntabilitas (ab), responsibilitas (rb), independensi (is) dan kewajaran (kw) terhadap penetapan kebijakan anti *fraud* dengan nilai 84.2% sedangkan 15.8% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Prosedur pencegahan baku (ppb) dan organisasi (or) dengan nilai masing-masing 78,7% dan 87,5% dipengaruhi oleh transparansi (tr), akuntabilitas (ab), responsibilitas (rb), independensi (is) dan kewajaran (kw). Sementara itu, 21,3% dan 12,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.

Pengaruh prinsip transparansi (tr), akuntabilitas (ab), responsibilitas (rb), independensi (is) dan kewajaran (kw) terhadap teknik pengendalian (tp) dengan nilai 78,6% sedangkan sisanya 21,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Pengaruh prinsip transparansi (tr), akuntabilitas (ab), responsibilitas (rb), independensi (is) dan kewajaran (kw) terhadap kepekaan terhadap *fraud* (ktf) dengan nilai 72,7% sementara 27,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.

R-Square dimasukkan ke dalam persamaan *Q-Square* berikut :

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,805^2)$$

$$= 0,64$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai Q^2 yang diperoleh sebesar 0,64 yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk sudah baik karena memiliki hasil *Q-Square* hitung di atas 0 sehingga model mempunyai *predictive relevance*.

Pengujian Hipotesis

1) *Path Coefficients*

Tabel 9
Path Coefficients

	Original Sample	T Statistics
X -> Y	0.897	35.144

Sumber, Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 9 hasil uji hipotesis yaitu, *good corporate governance* (X)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Y). Hal ini ditandai dengan nilai *t-statistics* adalah 35,14 (diatas 1.96) dan koefisien jalur 0,89. Dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 10
Total Effect

	Original Sample	T Statistics
TR -> Y	0.139	17.091
AB -> Y	0.212	25.704
RB -> Y	0.121	13.116
IS -> Y	0.304	26.493
KW -> Y	0.186	14.023
X -> Y	0.897	35.144

Sumber, Data diolah 2019

Keterangan :

- TR-> Y :Transparansi Terhadap Pencegahan Fraud
- AB -> Y :Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud
- RB -> Y :Responsibilitas Terhadap Pencegahan Fraud
- IS -> Y :Indepedensi Terhadap Pencegahan Fraud
- KW -> Y :Kewajaran Terhadap Pencegahan Fraud
- X -> Y :Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *SmartPLS 2.0* seperti pada tabel 10 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Transparansi (tr) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Y). Koefisien jalur yaitu 0,139 dan t-statistik menunjukkan signifikansi pengaruh yaitu 17,091 lebih besar dari t tabel 1,96..
- 2) Faktor akuntabilitas (ab) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap pencegahan *fraud* dengan *t -statistics* 25,704 dengan koefisien jalur 0,212.
- 3) Responsibilitas (rb) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dilihat dari t –statistik13,116 > 1,96 dan koefisien jalur 0,121.

- 4) Independensi (is) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai t - statistik 26,493 > 1,96 dan koefisien jalur 0,304.
- 5) Kewajaran (kw) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai 14,023 lebih besar dari nilai t tabel dan koefisien jalurnya kearah yang positif dengan nilai 0,186.

Teori keagenan seperti yang dijelaskan di kajian teori menyatakan *good corporate governance* merupakan upaya untuk menjembatani konflik antar pemilik dan pengelola perusahaan, dimana konflik yang terjadi bahwa agen (pengelola perusahaan) lebih banyak tahu tentang informasi perusahaan sehingga diperlukan tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. Teori *Stewardship* dalam penelitian ini dipertimbangkan mampu digunakan sebagai argument penjelasan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdapat dalam perusahaan akan memaksimalkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Berangkat dari teori ini dapat dilihat dari nilai koefisien jalur pada tabel 10 dimana koefisen jalur dan t-statistik masing masing prinsip *good corporate governance* yang berpengaruh terhadap variabel Pencegahan *Fraud* berpengaruh positif dan signifikan sehingga, setiap prinsip *good corporate governance* yang diterapkan pada Bank Perkreditan Rakyat dapat menjembatani konflik antar pemilik dan pengelola perusahaan dan penerapan *good corporate governance* Bank Perkreditan Rakyat dapat memaksimalkan kinerjanya agar tujuan perusahaan tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh prinsip prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang berpengaruh secara positif dan signifikan. Prinsip- prinsip *good corporate governance* terdiri dari :

- 1) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Akuntabilitas berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Responsibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Pengembangan ilmu pengetahuan
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan sebagai bahan acuan dalam pembelajaran dan pengembangan *good corporate governance* dan pencegahan *fraud* untuk program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan Penelitian ini, *good corporate goveranance* terhadap pencegahan *fraud* dapat diterapkan pada *civitas academica* Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Universitas Nusa Cendana selain itu dapat diterpakan pada badan/organisasi lainnya.
- 2) Bagi Obyek Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat yang belum sepenuhnya menerapkan *good corporate governance* sehingga menyebabkan BPR dilikuidasi seperti yang terjadi pada PT BPR Bina Dian Citra, PT BPR Akarumi, PT BPR Budi Setia, dan PT BPR Mega Karsa Mandiri dan 3 BPR Nusa Tenggara Timur

yang dinyatakan dibawah kategori sehat namun bukan berarti tidak sehat, agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti yang terdapat pada penelitian ini.

3) Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain di luar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang

berpengaruh pada pencegahan *fraud*. Sampel yang terpilih dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang. Peneliti selanjutnya dapat memperbaiki kriteria pemilihan sampel sehingga dapat mengakomodir semua jenis perusahaan perbankan. Tujuan menggunakan jenis perusahaan perbankan dengan lain atau industri yang berbeda dengan maksud apakah penelitian sejenis dengan obyek yang berbeda dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mas Daniri (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia
- Albrecht, W. S., C. O. Albrecht and C. C. Zimbelman. (2011). *Fraud Examination, 4th Edition* (Cengage Learning: Mason, Ohio).
- Arthana, I Komang (2019). "Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur." *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, Universitas Nusa Cendana, Vol. 7, No. 1, hal 35-43.
- Chin, W.W. (1995). *Partial Least Square is to LISREL as a Principal Components analysis is to common factor analysis*. *Technology Studies*, 2:315-319.
- Cressey, D. R. (1950). *The criminal violation of financial trust*. *American Sociological Review*, 15(6), 738-743.
- Dominikus, Octavianto Kresno Widagdo (2014). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan. Diponegara *Journal of Accounting*. 3(3), h: 1-9.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Indonesia, Bank. "Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur." KPW Bank Indonesia Provinsi NTT. Agustus 2018.
- J, Supranto, A M. (2002). *Metode Peramalan Kuantitatif untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jannah, Sitti Fitriatul (2016). "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan Fraud Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya) ." *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Vol 7 No. 2, 2016.
- Jensen & Meckling (1976). "The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial and Economics*, 3:305-360
- Jogiyanto dan Abdillah, Willy (2009). Konsep & Aplikasi *PLS (Partial Least Square)* Untuk Penelitian Empiris. Eds. Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Kuangan, Otoritas Jasa. *Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II 2018*. Otoritas Jasa Keuangan, n.d.
- . "Permasalahan Dan Tantangan BPR/BPRS." *Rakernas dan Seminnar Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia*. Pontianak, 2016.
- Kuangan, Otoritas Jasa. *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan*

- Tata Kelola Bagi Perkreditan Rakyat*. Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
- Mahaendrayasa, Putu Krishna Aryastha, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2017). "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar." *E-Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana, Vol. 21 No. 2, November 2017.
- Najahningrum, Anik Fatun (2013). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY". *Jurnal*. Universitas Negeri Semarang.
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2008). *Fraud Auditing. Edisi Kelima*. Bogor : BPKP.
- Sari, dkk (2015). "Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kecenderungan *Fraud* ". *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3, No. 1.
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutedi, Adrian (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan, Nogi S Hessel (2003). *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balaiurang.
- Thoyibatun, Siti (2009). "Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi". *Jurnal*. Universitas Negeri Malang.
- Wilopo (2006). "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia". *Jurnal*. STIE Perbanas : Surabaya.
- Wolfe, D.T and D.R. Hermanson (2004). *The Fraud Diamond: Considering The Four Element of Fraud. The CPA Journal*. Desember 2004, pp. 38-42.
- Wexley Kenneth, Yuki Gary (2003). *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia*. Jakarta : Rineke Cipta.
- <http://digilib.unila.ac.id/11362/16/BAB%20II.pdf>
- <http://repository.umy.ac.id/>